

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN TRANSPARANSI PADA YAYASAN PENDIDIKAN  
ISLAMIC BOARDING SCHOOL AL-ANWAR PETANANG KUMPEH**

***Analysis Of Sharia Financial Management In Improving Transparency At The  
Al-Anwar Petanang Kumpeh Islamic Boarding School Foundation***

**Windayani<sup>1</sup>, Usdeldi<sup>2</sup>, Muthmainnah<sup>3</sup>**

**<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi**

**<sup>1</sup>Email : Wyani2964@gmail.com**

**<sup>2</sup>Email: usdeldi@uinjambi.ac.id**

**<sup>3</sup>Email: muthmainnah@uinjambi.ac.id**

**Abstract**

*This study is entitled “Analysis of Sharia Financial Management in Enhancing Transparency at the Islamic Boarding School Education Foundation Al-Anwar Kumpeh.” The background of this research emphasizes the importance of implementing sharia financial management in Islamic educational institutions to create transparency, accountability, and financial governance aligned with Islamic values. The purpose of this study is to analyze the financial management system, identify existing obstacles, and find solutions to improve financial transparency at the Al-Anwar Foundation. This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that financial management at the Al-Anwar Foundation has implemented sharia principles such as trustworthiness (amanah), justice, and hisbah through participatory budgeting and record-keeping based on written evidence. However, several obstacles remain, including limited human resources, manual recording systems, and unstable funding income. The foundation addresses these challenges by setting budget priorities, providing sharia financial management training, and implementing social policies for underprivileged students. This study concludes that sharia financial management at the Al-Anwar Foundation has been carried out well; however, improvements in professional capacity and financial system digitalization are still needed to strengthen transparency.*

**Keywords:** Sharia Finance, Transparency, Financial Management, Islamic Education Foundation.

**Abstrak**

*Penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi pada Yayasan Pendidikan Islamic Boarding School Al-Anwar Kumpeh.” Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya penerapan manajemen keuangan syariah dalam lembaga pendidikan Islam untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana yang sesuai nilai-nilai Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengelolaan keuangan, mengidentifikasi hambatan, serta menemukan solusi dalam meningkatkan transparansi keuangan di Yayasan Al-Anwar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan*

*Huberman melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Yayasan Al-Anwar telah menerapkan prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan hisbah melalui perencanaan anggaran yang partisipatif dan pencatatan berbasis bukti tertulis. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM, pencatatan manual, dan ketidakstabilan pemasukan dana. Yayasan mengatasinya dengan penetapan prioritas anggaran, pelatihan keuangan syariah, serta kebijakan sosial bagi santri kurang mampu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan syariah di Yayasan Al-Anwar telah berjalan baik, namun perlu peningkatan profesionalitas dan digitalisasi sistem untuk memperkuat transparansi.*

**Kata kunci:** Keuangan Syariah, Transparansi, Manajemen Keuangan, Yayasan Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Agar dapat berjalan berkelanjutan, setiap lembaga pendidikan memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terutama dalam bidang keuangan. Pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi bagian dari prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), karena menyangkut perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan dana. Transparansi keuangan juga menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, donatur, orang tua peserta didik, dan pemerintah.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan memiliki landasan nilai yang kuat. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas, jujur, dan adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan keterbukaan bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga bagian dari ajaran syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam seharusnya menerapkan manajemen keuangan yang sesuai dengan nilai amanah, kejujuran, dan keadilan.

Salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakter khas adalah pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang berperan tidak hanya dalam pendidikan agama, tetapi juga dalam pembinaan sosial dan moral masyarakat. Seiring perkembangan zaman, pesantren mengalami perubahan dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih modern. Perubahan ini menuntut peningkatan manajemen, termasuk dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta tata kelola kelembagaan.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pesantren dan yayasan pendidikan Islam yang menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang sering muncul meliputi pencatatan yang masih manual, laporan keuangan yang sederhana, belum adanya prosedur operasional standar, keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, laporan keuangan sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka sehingga akses informasi bagi wali santri, donatur, dan masyarakat menjadi terbatas. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan menghambat dukungan dana bagi pengembangan lembaga.

Transparansi dan prosedur pengelolaan keuangan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Prosedur yang tidak tertib akan menyulitkan terwujudnya transparansi, sedangkan rendahnya transparansi membuat prosedur hanya menjadi formalitas tanpa pengawasan nyata. Oleh karena itu, pembenahan sistem

pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan mendesak bagi pesantren agar dapat menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan operasionalnya.

Pondok Pesantren Al-Anwar Petanang merupakan salah satu pesantren yang memiliki potensi besar sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan. Pesantren ini memiliki jumlah santri yang cukup banyak serta sumber pendanaan yang beragam, seperti iuran santri, donasi masyarakat, dan bantuan pemerintah. Kompleksitas aliran dana tersebut menuntut sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih profesional. Hasil pengamatan awal menunjukkan masih adanya kendala dalam pencatatan, pelaporan, transparansi, perencanaan anggaran, serta dokumentasi transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan keuangan syariah dalam meningkatkan transparansi pada Yayasan Pendidikan Islamic Boarding School Al-Anwar Petanang Kumpeh. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang ada, memahami faktor-faktor yang memengaruhi transparansi, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Dengan demikian, diharapkan yayasan mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder dan mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan di masa depan.

## **METODE**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penggambaran fenomena secara mendalam berdasarkan data empiris dari sumber primer dan sekunder. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara komprehensif bagaimana pengelolaan keuangan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, termasuk kendala yang dihadapi serta strategi yang diterapkan. Proses penelitian berlangsung secara iteratif, di mana pengumpulan, analisis, dan verifikasi data dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang utuh.

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Islamic Boarding School Al Anwar Petanang, sebuah lembaga pendidikan berbasis pesantren yang memiliki sistem pengelolaan keuangan internal. Objek penelitian difokuskan pada praktik pengelolaan keuangan dan mekanisme transparansi yang diterapkan di yayasan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu agar diperoleh informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan otoritas terkait pengelolaan keuangan yayasan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer, diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan catatan lapangan terkait praktik pengelolaan keuangan serta persepsi informan mengenai transparansi.
2. Data Sekunder, berupa dokumen pendukung seperti laporan keuangan tahunan, kebijakan pengelolaan dana, pedoman akuntansi pesantren, serta

arsip dan publikasi internal yayasan. Data sekunder berfungsi melengkapi dan memverifikasi data primer serta memberikan konteks historis.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali informasi mendalam mengenai mekanisme pengelolaan keuangan, strategi transparansi, dan tantangan yang dihadapi. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskrip untuk analisis. Informan penelitian meliputi ketua badan pembina yayasan, bendahara yayasan, guru, tokoh agama, dan wali santri.
2. Observasi, dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif terhadap aktivitas pengelolaan keuangan, seperti rapat anggaran, proses pelaporan, serta interaksi antar pemangku kepentingan selama 2–3 minggu.
3. Dokumentasi, melalui pengumpulan dan analisis dokumen resmi seperti laporan keuangan, neraca, serta dokumen kebijakan transparansi yang diverifikasi keasliannya.

Seluruh proses pengumpulan data memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk informed consent dan kerahasiaan informan.

### **Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data diuji melalui triangulasi, yang meliputi:

1. Triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda dalam pengelolaan keuangan.
2. Triangulasi teknik, melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk saling melengkapi dan memverifikasi data.
3. Triangulasi waktu, dengan membandingkan data dari periode yang berbeda guna melihat konsistensi dan perkembangan praktik transparansi keuangan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap:

1. Reduksi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan, dan pengkodean data berdasarkan tema-tema penelitian.
2. Penyajian data, melalui narasi deskriptif, matriks, dan tabel untuk mempermudah pemahaman hubungan antar data.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian hingga diperoleh temuan yang konsisten dan kredibel.

## **HASIL**

### **Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah pada Yayasan Al-Anwar**

Pengelolaan keuangan syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berfungsi mengatur serta mengelola sumber daya keuangan berdasarkan ketentuan syariah. Orientasinya tidak hanya pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pada nilai etika, moral, serta keadilan sosial. Prinsip inilah yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan di Yayasan Al-Anwar dianalisis melalui fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada tahap perencanaan, yayasan telah menunjukkan upaya sistematis dalam menyusun rencana keuangan yang berorientasi pada kemandirian lembaga. Yayasan mengelola aset produktif berupa kebun yang dibiayai secara mandiri, dan hasilnya dimanfaatkan kembali untuk mendukung operasional lembaga. Alokasi anggaran dirancang secara proporsional, dengan pembagian untuk kebutuhan operasional, pembangunan fisik dan sarana prasarana, serta kebutuhan lainnya sesuai prioritas. Proses perencanaan anggaran dimulai pada akhir tahun pelajaran, di mana setiap bagian seperti pendidikan, asrama, kebersihan, dan sarana prasarana menyampaikan usulan kebutuhan beserta estimasi biaya. Seluruh usulan tersebut dibahas melalui rapat bersama pimpinan yayasan dan kepala sekolah untuk menentukan skala prioritas berdasarkan kondisi keuangan dan proyeksi pemasukan dari SPP, donatur, maupun program lainnya. Guru turut dilibatkan untuk memberikan masukan terkait kebutuhan pembelajaran, sedangkan wali santri mendapatkan penjelasan mengenai rencana program tahunan melalui pertemuan menjelang tahun ajaran baru. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan dilakukan secara partisipatif, musyawarah, dan berorientasi pada keberlanjutan lembaga.

Dalam aspek pengorganisasian, pengelolaan keuangan di Yayasan Al-Anwar dilaksanakan secara terpusat pada bendahara dengan pengawasan langsung dari pimpinan yayasan. Setiap pengeluaran dana harus melalui persetujuan pimpinan sebelum dicairkan, sehingga terdapat mekanisme kontrol yang berlapis. Proses pengajuan dan persetujuan pengeluaran telah memanfaatkan sistem daring, meskipun struktur organisasi keuangan masih tergolong sederhana. Bendahara merangkap tugas pencatatan dan pelaporan tanpa dukungan staf administrasi khusus, sehingga beban kerja cukup besar. Guru dan santri hanya terlibat dalam kondisi tertentu, misalnya ketika ada kegiatan khusus yang memerlukan dukungan administrasi. Seluruh transaksi keuangan diupayakan sesuai prinsip syariah dengan menghindari riba serta memastikan kejelasan akad. Namun demikian, transparansi kepada wali santri masih terbatas karena laporan keuangan belum disampaikan secara terbuka kepada pihak luar yayasan.

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan keuangan dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan serta berpedoman pada prinsip syariah. Setiap transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, wajib disertai bukti tertulis seperti kwitansi dan nota pembelian. Sumber pemasukan berasal dari SPP santri, donatur, serta kegiatan internal, sedangkan pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan. Seluruh transaksi dicatat dalam buku kas umum secara manual. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan proses pencatatan sering bergantung pada waktu luang bendahara. Walaupun prosedur administrasi telah berjalan tertib, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan melalui digitalisasi serta penambahan tenaga administrasi agar lebih efektif dan efisien. Yayasan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengkaji manfaat dan kesesuaian syariah sebelum dana digunakan.

Pengawasan keuangan di Yayasan Al-Anwar dilakukan secara internal oleh pimpinan yayasan bersama badan pengawas. Evaluasi keuangan dilaksanakan melalui rapat bulanan yang membahas laporan pemasukan, pengeluaran, serta saldo akhir. Dalam beberapa kesempatan, guru dilibatkan agar mengetahui penggunaan dana yayasan. Sistem pengawasan ini menunjukkan adanya upaya menjaga

akuntabilitas dan amanah dalam pengelolaan dana. Namun, mekanisme pengawasan eksternal belum tersedia sehingga transparansi publik masih perlu ditingkatkan.

### **Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Syariah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Al-Anwar masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu kendala utama adalah ketidakstabilan pemasukan dana akibat keterlambatan pembayaran SPP dan infak dari wali santri. Kondisi ini menyebabkan arus kas yayasan sering mengalami hambatan, sementara kebutuhan operasional seperti konsumsi santri, kegiatan pembelajaran, serta biaya listrik dan air harus tetap berjalan. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan, karena pengelolaan keuangan hanya ditangani oleh satu bendahara tanpa staf pendukung. Selain itu, sarana teknologi informasi masih terbatas dan sering terganggu oleh pemadaman listrik, sehingga proses administrasi digital kurang optimal. Faktor lain yang memengaruhi adalah rendahnya kesadaran administrasi sebagian masyarakat, yang berdampak pada ketertiban pencatatan dan pembayaran.

### **Solusi Mengatasi Hambatan**

Untuk mengatasi hambatan tersebut, yayasan menerapkan berbagai solusi adaptif. Dalam kondisi pemasukan yang tidak stabil, pengurus menetapkan prioritas pengeluaran dengan mendahulukan kebutuhan pokok seperti konsumsi santri, gaji guru, dan operasional harian, sementara pengeluaran yang dapat ditunda dijadwalkan ulang. Yayasan juga memberikan kebijakan sosial bagi wali santri yang kurang mampu melalui keringanan biaya, kesempatan membantu bekerja di lingkungan yayasan, atau mencarikan donatur pihak ketiga. Dari sisi internal, peningkatan kapasitas pengurus dilakukan melalui pelatihan dan pembelajaran akuntansi agar pengelolaan keuangan lebih tertib dan profesional. Pengambilan keputusan keuangan dilakukan melalui musyawarah dan komunikasi internal yang intensif, sehingga setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas syariah.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan di Yayasan Al-Anwar menunjukkan bahwa praktik yang berjalan memiliki keterkaitan erat dengan konsep dasar manajemen keuangan syariah, meskipun implementasinya belum sepenuhnya mencapai standar ideal tata kelola syariah yang profesional. Dalam teori manajemen keuangan syariah, pengelolaan dana lembaga Islam harus berpijak pada prinsip tauhid, amanah, keadilan, kemaslahatan, serta akuntabilitas, yang seluruhnya diarahkan pada tercapainya *maqāṣid al-syarīʿah* dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan kemanfaatan sosial.

Dari sisi perencanaan, praktik penganggaran di Yayasan Al-Anwar yang menitikberatkan pada pemanfaatan aset produktif dan kemandirian lembaga sejalan dengan teori *Islamic financial planning* yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya halal secara produktif. Penggunaan kebun sebagai sumber pendapatan internal mencerminkan konsep investasi syariah, yaitu penempatan aset pada kegiatan riil yang memberikan nilai tambah dan manfaat sosial. Pola alokasi anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan juga sesuai dengan prinsip *adl* (keadilan) dan *tawazun* (keseimbangan), di mana distribusi dana tidak hanya

mempertimbangkan efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan sosial. Keterlibatan guru dan wali santri dalam proses perencanaan menunjukkan penerapan konsep *syura* (musyawarah), yang dalam teori manajemen Islam dipandang sebagai mekanisme partisipatif untuk mencegah dominasi kekuasaan dan memastikan keputusan keuangan mencerminkan kepentingan bersama.

Pada aspek pengorganisasian, struktur kewenangan yang menempatkan bendahara sebagai pengelola teknis dengan pengawasan pimpinan mencerminkan konsep *amanah* dan *hisbah* dalam keuangan syariah. Teori menyatakan bahwa pengelolaan dana umat harus berada dalam sistem kontrol yang mencegah penyalahgunaan wewenang. Mekanisme persetujuan pimpinan sebelum pencairan dana menunjukkan adanya *check and balance* yang sesuai dengan prinsip pengawasan syariah. Namun, keterpusatan tugas pada satu bendahara tanpa sistem pendukung profesional menunjukkan belum optimalnya fungsi *organizing* dalam teori manajemen modern berbasis syariah, yang menuntut pembagian tugas proporsional, sistem dokumentasi yang tertib, serta dukungan teknologi informasi untuk menjamin efisiensi dan akurasi.

Dalam pelaksanaan, pencatatan transaksi berbasis bukti tertulis serta penggunaan dana dari sumber halal mencerminkan implementasi prinsip *amanah* dan *shafafiyah* (transparansi). Teori manajemen keuangan syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus jelas akadnya, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta terdokumentasi dengan baik sebagaimana dianjurkan dalam prinsip pencatatan utang-piutang dalam Al-Qur'an. Namun, sistem manual yang masih digunakan menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai syariah yang telah dijalankan dan sistem administrasi modern yang seharusnya mendukung efektivitas pengelolaan.

Pada aspek pengawasan, praktik evaluasi rutin melalui rapat internal mencerminkan penerapan prinsip *hisbah*, yaitu pengawasan moral dan administratif untuk menjaga integritas pengelolaan dana. Dalam teori, pengawasan syariah idealnya meliputi dua dimensi, yaitu pengawasan internal berbasis nilai amanah dan pengawasan eksternal berbasis audit profesional. Ketidadaan audit independen dan pelaporan publik menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas sosial belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, teori menyatakan bahwa transparansi kepada pemangku kepentingan merupakan bagian dari tanggung jawab moral lembaga Islam dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Hambatan yang dihadapi yayasan, seperti keterbatasan SDM, sistem manual, dan arus kas tidak stabil, dapat dijelaskan melalui teori kelembagaan Islam yang menegaskan bahwa keberhasilan manajemen keuangan syariah tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi juga pada kapasitas struktural dan sistem pendukung. Ketika fungsi *organizing* dan *controlling* tidak diperkuat dengan teknologi, SOP, dan audit, maka prinsip efisiensi dan akuntabilitas sulit tercapai secara optimal.

Solusi adaptif yang diterapkan yayasan, seperti prioritas kebutuhan pokok, kebijakan sosial bagi wali santri, dan peningkatan kapasitas SDM, menunjukkan penerapan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *ta'awun* (tolong-menolong). Dalam teori keuangan Islam, fleksibilitas kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif merupakan bentuk nyata implementasi etika ekonomi Islam. Namun, agar selaras dengan konsep *good governance* syariah, langkah-langkah

tersebut perlu diikuti dengan reformasi sistemik berupa digitalisasi keuangan, audit internal terstruktur, serta pelaporan terbuka.

Dengan demikian, secara teoritik dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan Yayasan Al-Anwar telah merepresentasikan nilai-nilai fundamental manajemen keuangan syariah pada tataran normatif dan moral. Akan tetapi, pada tataran struktural dan administratif, masih diperlukan penguatan sistem agar prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tidak hanya menjadi nilai etis, tetapi juga terwujud dalam tata kelola keuangan yang profesional dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi pada Yayasan Pendidikan Islamic Boarding School Al-Anwar Kumpeh”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan syariah di Yayasan Pendidikan Islamic Boarding School Al-Anwar Kumpeh telah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah, seperti amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dalam perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, pencatatan pemasukan dan pengeluaran berbasis bukti tertulis, serta penggunaan dana untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan bersama.
2. Hambatan utama dalam pengelolaan keuangan syariah meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, sistem pencatatan yang masih manual, ketidakstabilan arus kas akibat keterlambatan pembayaran dari wali santri, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi. Hambatan ini berdampak pada keterlambatan pelaporan dan belum optimalnya transparansi keuangan.
3. Solusi yang diterapkan yayasan dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui penetapan skala prioritas pengeluaran, penguatan musyawarah dan evaluasi rutin, pemberian kebijakan sosial bagi santri kurang mampu, serta upaya peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan keuangan syariah. Solusi ini menunjukkan adanya komitmen yayasan untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Gideon. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2023.
- Azizah, S. N., Aimah, S., Khaudli, M. I., Hamid, A., & Hidayatulloh, N. (2021). *Manajemen Keuangan dalam Pemenuhan Fasilitas Pendidikan Kampus Berbasis Pesantren*.
- Bakhri, S. (2025). *Model Integrasi Keuangan Sosial Islam dan Bisnis dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Sidogiri*. UIN Malang.
- Bari, M. (2024). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Akademik dan Non Akademik di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Kota Malang*. UIN Malang.

- Budi Gautama Siregar. *Manajemen Keuangan Syariah*. Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2025.
- Darmawan. *Manajemen Keuangan Syariah*. Edisi Pertama, UNY Press, Yogyakarta, 2022.
- Dewi Laela Hilyatin, & Akhris Fuadatis Sholikha. *Manajemen Keuangan Pesantren*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Febriani, E. (2025). *Arah Strategi Manajemen Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Model Teoritis dan Aplikasi Praktis*, 3(1).
- Ghifari, M. A., & Laziva, N. (2025). *Peran Budgeting Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Pesantren*, 56.
- Hanida, I., Hamzani, U., & Yunita, K. (2024). Analisis Perspektif Donatur dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 7(2), 160–170.
- Ifani, N. N. (2024). *Sistem Informasi Akademik dan Keuangan Pondok Pesantren Al Huda Berbasis Website*. Jurnal Algoritma.
- Islamiyanto, diwawancarai oleh penulis, Mekarsari, 25 Desember 2025.
- Iskandar, diwawancarai oleh penulis, Muaro Jambi, 25 Desember 2025.
- KH. Asrofi Asror, diwawancarai oleh penulis, Muaro Jambi, 16 Januari 2026.
- Khairunnisa, F., & Firmansyah, R. (2021). Transparansi Laporan Keuangan dan Kepercayaan Publik pada Pesantren. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 11(1), 56–70.
- Khojairi, W. (2025). *Rancang Bangun Smart Pondok dengan Manajemen Keuangan Santri pada Pondok Pesantren Mathaliul Anwar Kabupaten Sumenep*.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1–10*.
- M. R. Pahleviannur dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Maulana, Y. (2025). *Perancangan Strategi Keuangan untuk Optimalisasi Manajemen Keuangan di Akper Buntet Pesantren Cirebon*. Paramurobi: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Mutohar, P. M., & Darmawan, D. (2025). Pelatihan Manajemen Sistem Informasi Digital dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Pondok Pesantren Lubabul Fattah. *Jurnal Abdinus*.
- Noviriani, E., Alrizwan, U. A., Mukaromah, L., & Zurmansyah, E. (2022). Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga dalam Sudut Pandang Perempuan. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 155–168.
- Nurhayati, D., & Hidayah, N. (2021). Akuntabilitas Keuangan pada Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 9(1), 45–57.
- Pratiwi, R., Adda, H. W., Anisah, A., & Evrianti, H. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan pada Yayasan. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 5047–5050.
- S. S. Marinda dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Global Ekskutif Teknologi, 2022.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-20). Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Supriati. "Wawancara Bagian Bendahara Yayasan." Direct, 24 Agustus 2025.
- Susanto, H., & Martono, S. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Lembaga Pendidikan Pesantren. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 235–248.
- Suwitno, S., Jatwoko, J., Ali, N. D., & Rosma, I. H. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Berbasis Cloud Computing di Pondok Pesantren Khairul Ummah 2 Pekanbaru. *Jurnal Bhakti Nagori*.
- Syahrizal, A., & Anita, E. (2021). Analisis Manajemen Keuangan Pondok Pesantren. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 26–37.
- Tassya Putri Azzahra & Rayyan Firdaus. (2024). Solusi Etis bagi Pengelolaan Keuangan Berbasis Nilai Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(4), 54–61.
- Untung, S., & Afiqoh, A. (2023). Manajemen Keuangan Pendidikan Islam. *Khazanah Pendidikan*, 17(2), 130.
- Uswatun Khasanah, diwawancarai oleh penulis, Petanang, 05 Januari 2026.
- Widodo, S., & Cahyaningrum, N. P. (2023). Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 41–56.
- Wulandari, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Implementasi Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 106–118.
- Yasir, M., Kristianti, T., & Aziz, A. S. (2024). Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Keuangan Syariah melalui Pemahaman Istilah Bahasa Asing Perbankan Syariah. *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 316–325.